



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL

Siaran Pers

22 Desember 2011

**Perjalanan Panjang Sektor Peradilan Timor
Leste**

***“Perkembangan dan tantangan sistem peradilan Timor
Leste sepanjang tahun 2011”***

Pengantar

Sebagai Negara Hukum yang Demokratis, sektor peradilan merupakan sebuah komponen kunci dalam Negara Hukum yang demokratis itu sendiri. JSMP percaya bahwa untuk mewujudkan konsep dan tatanan negara hukum yang demokratis, hanya bisa terjadi kalau semua pihak bertekad untuk secara terus menerus bekerja dalam semangat kebersamaan. JSMP mengakui telah banyak upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait baik itu dari institusi-institusi Negara maupun melalui masyarakat madani/sipil untuk memperkuat sektor peradilan selama ini.

Selama periode tahun 2011, JSMP mencatat bahwa terdapat kemajuan seraca signifikan atau perubahan positif dalam beberapa aspek. Walaupun demikian, JSMP tidak mengingkari bahwa di lain pihak sistem peradilan kita masih menghadapi berbagai macam tantangan no hambatan dalam rangka untuk memastikan dan menegakan keadilan sebagai cerminan negara hukum, terutama bagi kejahatan berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan masa lampau yang terjadi selama masa pendudukan Indonesia. Dalam kasus ini, JSMP berpandangan bahwa hal ini terjadi bukan karena faktor keterbatasan sumberdaya manusia, atau karena hambatan teknis lainnya, tetapi itu terutama karena “kelalaian institusional dan kecerobohan profesional dari hakim penanggung-jawab atas kasus tersebut. JSMP sangat menyesalkan mengenai praktek tersebut, karena ini akan mencederai sentimen publik mengenai bekerjanya sistem peradilan formal dalam menjamin dan menyediakan keadilan bagi semua orang sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi.

Berikut ini kami mencatat sebagian dari perkembangan/kemajuan dan tantangan yang dirangkum JSMP selama periode tahun 2011, termasuk rekomendasi alternatif atas setiap isu yang dianggap penting untuk diperhatikan di masa mendatang.

Kemajuan dalam aspek legislatif dan kebijakan;

- Selama tahun 2011 JSMP mencatat bahwa secara khusus terdapat empat belas (14) undang-undang yang disahkan di Parlemen Nasional¹, namun hanya satu undang-undang yang ada hubungannya dengan sektor peradilan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Walaupun demikian, JSMP tetap menyesalkan proses pengesahan dan pemberlakuan mengenai undang-undang penting ini karena tidak menyediakan waktu yang memadai untuk keterlibatan publik.² Selain itu, Parlemen Nasional juga gagal untuk melanjutkan sidang pleno dan pengesahan atas dua rancangan undang-undang penting lainnya mengenai Reparasi dan Institut Memorial. Oleh karena itu, JSMP mendesak kepemimpinan yang kuat dari Parlemen Nasional untuk mengesahkan kedua undang-undang ini sebelum mandat mereka berakhir.
- Berlanjutnya kebijakan dan program pelatihan di Pusat Pelatihan Yudisial yang diorganisir oleh Kementerian Kehakiman merupakan langkah dan terobosan yang sangat penting untuk memperkuat kualitas profesional dan juga meningkatkan kuantitas para aktor peradilan.
- Lebih lanjut sepanjang pemantauan JSMP bahwa proses perekrutan dan pelatihan atas para calon hakim, jaksa dan pengacara publik tetap dilanjutkan, sementara pelatihan terpisah juga sedang dijalankan kepada para pengacara pribadi. Saat ini kelompok peserta pelatihan pengacara pribadi golongan pertama tengah mengikuti magang atau praktek kepengacaraan di Portugal³ sebagai bagian dari program pelatihan yudisial itu sendiri.
- Setidaknya pada bulan Mei 2011, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan acara pelantikan terhadap para aktor peradilan baru, antara lain; 4 orang Hakim; 5 orang Jaksa Penuntut Umum dan 5 Pengacara Publik. Total mereka yang dilantik menjadi 14 orang. Dengan demikian, total para aktor yudisial kita pada saat ini, antara lain: hakim 18 orang, jaksa penuntut umum 17 orang dan pengacara publik 16. Total keseluruhan mereka menjadi 51 orang.

Kemajuan di tingkat pengadilan;

¹ Sumber dari Program Pemantauan Parlemen JSMP

² Tolong dilihat siaran pers dan *justice up date* diterbitkan JSMP yang terseedia di website JSMP: www.jsmp.minihub.org; Presiden Timór Léste: Membuat Muzijat dengan memberlakukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki 2000-lebih pasal dalam satu hari dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dinamika Legislatif di Parlemen Nasional.

³ Saat ini, terdapat 7 orang pengacara pribadi yang sedang mengikuti program magang di Portugal, termasuk di dalamnya Presiden AATL.

- JSMP mencatat bahwa Pengadilan Dili, Suai dan Baucau tetap menjalankan program persidangan keliling (*mobile court*) di distrik-distrik. JSMP berpandangan bahwa ini merupakan langkah yang sangatlah produktif dan responsif untuk menjawab persoalan real yang dihadapi oleh para pihak antara lain; keterbatasan sarana transportasi, biaya, persoalan mengenai jarak, waktu dan akomodasi temporal. JSMP memandang bahwa program dan inisiatif persidangan keliling menghasilkan dampak bermulti-dimensional atas tantangan yang senantiasa menghambat masyarakat untuk mengakses keadilan dan melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka.
- JSMP juga mencatat, Pengadilan Tinggi mengawali persidangan secara terbuka untuk umum atas sebuah persidangan pembaharuan/tinjauan terhadap alat bukti. Ini merupakan sebuah atmosfer baru di lingkungan pengadilan tinggi. Menurut JSMP bahwa persidangan yang terbuka untuk umum sebagai aspek penting untuk memastikan transparansi dan akontabilitas atas setiap putusan pengadilan. Ini akan menyediakan ruang kepada masyarakat untuk turut serta mengontrol produktivitas sistem peradilan kita dan pada saat yang sama dapat mencegah persepsi-persepsi negatif atas proses dan kesimpulan yang dihasilkan oleh pengadilan atas sebuah kasus. Oleh karena itu, JSMP terus mendesak Pengadilan Tinggi untuk melanjutkan persidangan secara terbuka untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara luas, kalau tidak ada alasan atau hambatan yang menuntut persidangan dilakukan secara tertutup
- Hal penting lainnya, bahwa para hakim dan jaksa menunjukkan kemauan baik mereka untuk mendengar dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, terutama pihak Kejaksaan Agung, telah menunjukkan kemauan baik dan komitmen mereka untuk melibatkan atau berpartner dengan masyarakat sipil melalui menghadiri forum-forum yudisial atau forum relevan lainnya di sektor peradilan yang diorganisir oleh organisasi masyarakat sipil.
- JSMP juga mencatat bahwa saat ini pengadilan-pengadilan kita menunjukkan keterbukaan untuk publik dan bersedia untuk menyediakan informasi atas kasus-kasus yang diperlukan tanpa birokrasi sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. JSMP memahami bahwa praktik ini merefleksikan apa yang telah ditentukan dalam pasal 77 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai asas "*publisitas*" Namun demikian JSMP tetap menyesalkan karena semua dokumen tersebut hanya tersedia dalam bahasa Portugis dan tidak tersedia dalam versi Tetum yang juga merupakan bahasa resmi lainnya yang digunakan secara luas oleh mayoritas penduduk Timor Leste untuk berkomunikasi.
- Selain itu, JSMP juga mencatat bahwa pihak kejaksaan dan pengadilan sanggup memberikan prioritas untuk mengadili kasus-kasus yang berhubungan dengan praktik korupsi yang melibatkan otoritas negara dan beberapa aktor privat lainnya.
- Lebih lanjut, pengadilan juga menunjukkan komitmen mereka untuk memberantas kasus-kasus kekerasan berbasis gender⁴. Realitas ini dapat dibuktikan melalui volume jumlah

⁴ Diantara 68 kasus yang dipantau oleh WJU dari bulan Januari-Oktober 2011, terdapat 31 kasus yang diadili dan diputuskan di pengadilan.

kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan, walaupun kualitas putusnya masih jauh dari yang diharapkan.

- Diantara kemajuan-kemajuan tersebut, JSMP mencatat kemajuan yang paling progresif dan signifikan dalam tahun 2011 adalah “**Putusan Pengadilan Tinggi; No. 80/CO/2011/TR**” atas upaya hukum banding yang diajukan oleh kejaksaan mengenai interpretasi penerapan atas pasal 125 KUHAP. Putusan ini menurut JSMP telah memberikan resolusi hukum atas pembungkaman keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini. Putusan ini telah memberikan jalan keluar hukum *ter-spektakuler* dalam sejarah sistem hukum Timor Leste, karena melalui putusan ini, Pengadilan Tinggi telah membongkar kevakuman keadilan atas korban dengan mewajibkan pada korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk bersaksi melawan para terdakwa di depan pengadilan. Sebelumnya, di setiap persidangan atas kasus yang melibatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (suami-istri), korban diberi pilihan untuk tidak bersaksi atas kasusnya.

Sementara kemajuan-kemajuan tersebut, JSMP juga mencatat beberapa tantangan dan hambatan substansial yang mengarah pada upaya untuk mencederai berfungsinya sistem peradilan formal (pengadilan) dan terutama mencederai kepentingan keadilan para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Tantangan dan hambatan tersebut antara lain:

- *Pengadilan Distrik Dili kehilangan kapasitasnya dan secara institusional telah gagal untuk menghukum, menjamin dan menegakan keadilan atas kasus kejahatan berat masa lampau yang melibatkan Milisi (BMP) yang dihukum 9 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 8 Juli 2011. JSMP sangat menyesalkan keadaan ini karena menurut JSMP kegagalan itu terutama terjadi karena kelalaian institusional yang dilakukan oleh hakim penanggungjawab perkara yang nota bene adalah seorang hakim internasional yang diperkerjakan di Pengadilan Timor Leste. Yang sangat memprihatkan adalah hingga saat ini, JSMP tidak melihat upaya konkrit baik dari pengadilan maupun dari pihak kejaksaan selaku eksekutor putusan pengadilan untuk mencari terpidana yang telah menghindar dan mengabaikan putusan penjara yang dijatuhkan kepadanya.*
- Kegagalan eksekusi putusan pengadilan atas kasus ini telah secara jelas menunjukkan bahwa budaya impunitas atas kasus masa lampau terus tumbuh subur di Timor Leste. JSMP menduga adanya upaya terselubung untuk menghalangi kewajiban negara untuk menghukum para pelaku kejahatan masa lampau. JSMP mencatat dua kasus yang melibatkan kejahatan masa lampau melarikan diri ketika upaya hukum banding masih diproses di Pengadilan Tinggi. Mereka adalah terpidana Lavio dan Domingos Maubiti pada tahun 2010.
- Hambatan esensial lainnya yang diungkap JSMP adalah, hingga saat ini belum nampak upaya dan kemauan baik dari pengadilan untuk menerapkan Undang-Undang No. 2/2009 tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi secara efektif. Walaupun JSMP mencatat bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan versi terjemahan dalam bahasa Tetun, namun JSMP tidak melihat bahwa pengadilan menggunakan undang-undang ini dalam persidangan di pengadilan. JSMP tidak memahami dengan baik alasan/motif di balik situasi ini, namun JSMP mendorong pengadilan untuk menerapkan undang-undang tersebut di pengadilan atas kasus-kasus yang melibatkan otoritas negara, kejahatan korupsi, kejahatan berat terhadap kemanusiaan, kekerasan domestik dan kasus berdimensi kejahatan transnasional lainnya yang memiliki dampak masif.

- JSMP juga mencatat bahwa terdapat masalah mendasar atas interpretasi Pasal 300 KUHAP mengenai *upaya hukum banding* dan implikasinya terhadap pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dengan pemahaman lain kapan sebuah putusan pengadilan dianggap memiliki kekuatan hukum tetap. JSMP mengungkap perbedaan interpretasi yang tajam antara para aktor peradilan dalam memahami pasal 300 KUHAP yang pada gilirannya berimplikasi sangat serious terhadap eksekusi putusan *kondemnatoir* (putusan yang bersifat menghukum) dari pengadilan.
- Walaupun kebijakan pelatihan yudisial terus berlanjut, namun pengadilan dan kejaksaan terus menghadapi hambatan signifikan dalam aspek sumber daya manusia di kedua institusi ini. JSMP mencatat bahwa sering kali pengadilan gagal untuk melaksanakan persidangan atas kasus-kasus yang menuntut persidangan dengan hakim majelis/pengadilan dengan komposisi hakim kolektif. Di Kantor Kejaksaan Distrik Dili, misalnya seorang jaksa penuntut umum, bertanggung jawab atas 500 –an lebih kasus setiap 6 bulan⁵. Ini sebuah beban kerja yang sangat berat dan tidak seimbang antara jumlah kasus yang mereka tangani dengan kapasitas individu mereka. Beban kasus yang melampaui batas kapasitas profesional mereka akan berpengaruh terhadap kualitas dakwaan yang mereka ajukan ke pengadilan.
- Persoalan terjemahan dan bahasa masih terus menjadi hambatan substansial di pengadilan kita. JSMP mencatat bahwa kualitas terjemahan di pengadilan terus menjadi masalah klasik dan pada saat yang sama jumlah para penerjemah juga masih sangat terbatas.
- Selanjutnya, pengadilan-pengadilan kita juga masih menghadapi hambatan serious mengenai pegawai panitera pengadilan yang merupakan elemen penting untuk membantu proses persidangan kasus dan mempersiapkan dokumen dan prosedur persidangan lainnya kepada hakim.
- Selain itu, JSMP juga mencatat secara khusus Pengadilan Distrik Dili belum memiliki jadwal persidangan tetap sebagaimana pengadilan distrik lainnya.

Mengacu kepada kemajuan-kemajuan dan hambatan-hambatan yang juga merupakan catatan keprihatinan JSMP tersebut di atas, JSMP mengidentifikasi beberapa usulan-usulan pikiran alternatif sebagai rekomendasi untuk kepentingan pembaharuan institusi-institusi terkait di masa mendatang. Usulan-usulan ini juga berciri desakan kepada institusi-institusi terkait untuk diperhatikan secara proporsional dan profesional di masa mendatang. Rekomendasi dan desakan/tuntutan tersebut diantaranya;

1. Mendorong badan-badan legislatif baik Parlemen Nasional ataupun di tingkat Dewan Kementerian untuk melestarikan budaya konsultasi secara terbuka dan menyediakan waktu yang memadai kepada publik sebelum di bawa ke persidangan pleni, pengesahan dan penyerahan kepada Presiden untuk diberlakukan/diumumkan dalam Lembaran Negara.
2. Mendorong dan mendesak Presiden untuk menggunakan kewenangannya secara efektif menurut Konstitusi, dan menggunakan hak-hak yang diberikan oleh Konstitusi secara efektif sebelum Presiden mengeluarkan dekrit untuk memberlakukan sebuah undang-undang. Paling

⁵ Percakapan informal yang dilakukan oleh JSMP dengan Kejaksaan Distrik Dili.

minim, JSMP mendesak agar Presiden memanfaatkan para tenaga ahli atau penasihat-penasihat hukumnya, untuk memastikan bahwa segala bentuk materi undang-undang yang diajukan oleh Parlemen Nasional dipahami dan dikaji secara legal dan politis secara seksama sebelum diberlakukan. Dengan bahasa lain, mendesak Presiden untuk menggunakan hak vetonya secara optimal.

3. Mendesak Presiden untuk menjunjung tinggi kewenangan konstitusional yang diberikan oleh rakyat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konstitusi.
4. Mendesak kepada para hakim di pengadilan untuk memastikan bahwa setiap putusan *kondemnatoir* (putusan yang bersifat menghukum) harus dijalankan secara efektif tanpa penundaan yang tidak layak untuk menjamin keadilan bagi korban. Secara khusus JSMP mendesak kepada Pengadilan Distrik Dili dan pihak Kejaksaan Umum untuk mengambil langkah yang tepat dan efektif atas kasus terpidana Valenti Lavio dalam kasus kejahatan kemanusiaan yang telah melarikan diri dari tanggungjawab hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Terutama, JSMP mendesak pertanggungjawaban institusional atas kelalaian dan kecerobohan yang disebabkan oleh hakim internasional yang arogan dan tidak profesional dalam kasus ini. JSMP menyesalkan kegagalan eksekusi ini, hanya karena keterlambatan hakim untuk menyiapkan putusan tertulis harus memakan waktu tiga bulan lamanya. Keterlambatan inilah yang kemudian memberikan kesempatan kepada terpidana untuk melarikan diri dari Timor Leste. Sebuah kelalaian profesional yang seharusnya tidak perlu terjadi jika hakim tersebut memahami peran profesi dan peran institusionalnya untuk menegakan keadilan bagi para korban dan menghukum setiap individu yang mencoba menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun.
5. Meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk memastikan penyeragaman interpretasi/penafsiran atas pasal 300 KUHAP untuk menghindari mis-interpretasi antara para aktor peradilan. JSMP mendesak agar setiap putusan *kondemnatioir* harus dijalankan sebelum Pengadilan Tinggi memutuskan lain. Langkah ini diharapkan untuk mencegah kasus Lavio plus Domingos Maubuti (dua orang terpidana atas kasus kejahatan berat yang gagal dieksekusi) tidak lagi terjadi di masa mendatang.
6. Mendorong semua pengadilan untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi di semua tingkat pengadilan, terutama untuk kasus yang melibatkan otoritas negara atau kasus yang mempunyai dampak terhadap keamanan saksi maupun korban karena kekhasan/ciri yang dimiliki oleh masing-masing kasus tersebut.
7. Mendorong semua pengadilan untuk mengembangkan dan meningkatkan volume persidangan keliling di semua distrik hingga pemerintah telah mendirikan pengadilan di wilayah-wilayah yang telah ditentukan.
8. Terus mendorong pengadilan dan kejaksaan atau para aktor peradilan untuk melanjutkan dan meningkatkan semangat kerjasama dan memperkuat hubungan kemitraan dengan masyarakat sipil, dan memahami/menggampang kelompok masyarakat sipil sebagai sumber daya yang potensial untuk mempromosikan dan memperkuat sistem peradilan di Timor Leste.

9. Mendorong Kementerian Kehakiman untuk memberikan perhatian serious atas perihal penerjemah dan terjemahan di semua pengadilan. Selain itu, mendorong untuk menyediakan dan melestarikan kamus hukum Tetun yang dapat digunakan untuk membantu semua proses persidangan dijalankan dalam bahasa Tetun, apabila tidak ada kebutuhan untuk menjalankan persidangan dalam bahasa Portugis.

Terlepas dari daftar panjang hambatan dan tantangan di depan yang masih terus menggerogoti sistem hukum kita, namun JSMP meyakini bahwa dengan semangat dan upaya kolektif yang telah kita tanamkan selama ini, JSMP yakin bahwa suatu saat kita mampu menghalau atau menyelesaikan tantangan dan hambatan tersebut dan menempatkan institusi pengadilan di tempatnya yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi. Terutama JSMP menghimbau semua pihak untuk sadar dan menghargai kedaulatan institusi pengadilan sebagai institusi yang independen dalam menjalankan perannya hanya berdasarkan amanat undang-undang dan Konstitusi.

JSMP terus mengajak dan mendorong semua orang untuk tetap bekerja-sama untuk memperkuat sistem hukum kita dan terutama untuk mendorong partisipasi publik dalam membangun dan menegakan sektor peradilan di Timor Leste.

Melalui kesempatan ini, JSMP ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan dalam kepada semua pihak, baik itu kepada para hakim, jaksa dan pengacara atau komunitas profesi hukum lainnya yang telah bekerja keras dan mengabdikan diri mereka untuk membangun dan mengembangkan sistem hukum Timor Leste. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama juga kami dedikasikan kepada para donor JSMP yang selama ini telah mendukung JSMP dan program-program kami. Donor-donor tersebut diantaranya; USAID-The Asia Foundation, Pemerintah Australia melalui AUSAID dan Justice Facility, NOREM, Misereor, dan UNFPA dan UN Women melalui program MDG fund. JSMP percaya dukungan Anda sekalian telah menanamkan benih harapan bagi masyarakat Timor Leste yang lebih di masa mendatang.

“Sekali lagi mendukung program JSMP itu artinya mendukung program keadilan bagi semua orang.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Tlf: 3323883

Email: Luis@jsmp.minihub.org